

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA, EFEKTIVITAS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT TERHADAP PENGOPTIMALAN PENGELOLAAN DANA DESA

¹Ni Putu Dessy Eka Aryani,
¹Dr. Desak Nym Sri Werastuti, ²I Made Pradana Adiputra

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {dessyekaaryani6766@gmail.com, sri.werastuti@undiksha.ac.id,
adiputraundiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan masyarakat. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengoptimalan pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kepala desa, bendahara desa, pendamping lokal desa dan pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat) sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang turut serta mengelola dan mengawasi jalannya pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu dimana terdapat 29 desa di Kabupaten Buleleng yang bermasalah dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahap I dan tahap II sehingga dana desa tahap III terancam tidak dicairkan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: pengoptimalan pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa, keterlibatan masyarakat

Abstract

The study aims to analyze the influence of the competence of village government officials, the effectiveness of the performance of village local counterparts, and the community involvement in optimizing village fund management in the village government of Buleleng Regency. The independent variables in this study were the competence of village government officials, the effectiveness of the performance of the village's local counterparts and the community involvement. Meanwhile the dependent variable was the optimization of village fund management. The population of this study included all village heads, village treasurers, local village facilitators and BPD (Community Consultative Body) officials as the representatives of village communities who participated in managing and overseeing the management of village funds in Buleleng Regency. The sample of this study used a purposive sampling with certain criteria where there were 29 villages in Buleleng Regency that had problems in the realization of the village budget funds for phase I and phase II. Therefore, the village funds in phase III were threatened not to be disbursed. The data analysis technique used multiple linear regression with a total of 220 respondents who filled out the questionnaire. The results of this study stated that the competence of village government officials had a positive effect on optimizing village fund management, the effectiveness of the performance of local

village facilitators had a positive effect on optimizing village fund management and community involvement had a positive effect on optimizing village fund management.

Keywords: optimization of village fund management, competence of village government officials, effectiveness of village local counterparts' performance, community involvement

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman yang terletak jauh dari kota dimana kegiatan kemasyarakatan masih sederhana yang dipimpin oleh kepala desa serta pembagian wilayah berdasarkan derajat otonomi yang telah disepakati dan berada dibawah naungan kecamatan. Hal ini juga serupa dengan pengertian desa menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014. Pemerintah mendidik desa agar memimpin dan mengatur masyarakatnya secara mandiri dibawah pimpinan Kepala Desa namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Demi menunjang kemandirian desa pemerintah membantu desa perihal dana, dimana dana tersebut dikenal dengan nama dana desa (Wibowo, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, dana desa merupakan sejumlah dana dan memang dianggarkan oleh pemerintah untuk desa. Dana desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memang sudah dialokasikan untuk desa *minimal* 10% dari APBN dan nantinya akan dicairkan ke desa melalui tiga tahap, tahap pertama disalurkan sebesar 20%, tahap kedua dan ketiga 40%. Dana yang telah diberikan harus digunakan dan dikelola secara tepat serta terkontrol (Wibowo, 2019). Setiap kegiatan yang dananya diambil dari dana desa, harus melalui beberapa tahapan seperti perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang jelas sesuai dengan prinsip tata kelola. Maka dari itu semua kegiatan harus dibuatkan laporan secara transparan sesuai kenyataan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Namun kenyataan dilapangan terdapat banyak desa yang kurang optimal dalam mengelola dana desanya. Hal ini terbukti dari 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tak dapat cairkan dana desa tahap III di tahun 2019 kemarin (Ardi, 2019). Desa tersebut terancam karena tidak

mematuhi aturan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan juga belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemakaian dana desa tahap 1 dan II. Jika Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban masih belum diselesaikan dalam batas waktu tertentu, maka anggaran dana desa tahap III yang semestinya dibagikan akan jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan masuk Kas Negara (Hartono, 2019).

Adapun desa yang terancam tidak dicairkan dana desa tahap III yaitu Kecamatan Sawan, meliputi Desa Giri Emas; Desa Galungan; dan Desa Bebetin. Kecamatan Sukasada, meliputi Desa Pegayaman; Desa Selat; dan Desa Kayu Putih. Kecamatan Buleleng, meliputi Desa Anturan, Desa Sari Mekar, Desa Poh Bergong, Desa Petandakan dan Desa Pengelatan. Kecamatan Tejakula hanya ada satu desa yaitu Desa Tembok. Kecamatan Kubutambahan, meliputi Desa Tunjung dan Desa Tamblang. Kecamatan Gerokgak, meliputi Desa Pemuteran; Desa Penyabangan; Desa Musi; Desa Sanggalangit dan Desa Celukan Bawang. Kecamatan Seriri, meliputi Desa Ularan, Desa Tangguwisia, Desa Pengastulan, Desa Bubunan dan Desa Umeanyar. Kecamatan Busungbiu, meliputi Desa Kedis; Desa Kekeran; Desa Sepang Kelod dan Kecamatan Banjar, meliputi Desa Tirta Sari dan Desa Tegeha (BaliPuspaNews.com, 2019).

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi pengoptimalan dana desa adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Pemerintah menegaskan jika rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) karena desa masih kurang paham dalam menyusun anggaran desa sesuai persyaratannya

(Danisari, 2018). Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri (Agustini, 2017). Berpedoman dengan program Nawa Cita ke-3 yaitu akan membangun Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa dengan dukungan aparatur desa yang berkualitas serta berkompeten dibidangnya, khususnya Kepala desa. Kepala desa sebagai orang yang bertanggungjawab di desa harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk bidangnya. (Agustini, 2017).

Pada hubungan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada hasil penelitian dari Tarjo (2019), Handayani (2019), Gagali (2019), Kumalasari (2018), Mada,dkk (2017) dan Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.
H₁: Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat menyebabkan dana desa tidak terserap dengan baik yaitu kurangnya kinerja pendamping lokal desa untuk mengabdikan pada desa (Ramdoni, 2019). Pendamping lokal desa merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan desa. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, menyatakan tugas pendamping desa ialah melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat dalam membantu, melindungi, mengarahkan serta memfasilitasi desa agar tercapai tujuan desa tersebut. Namun dalam hal ini kinerja pendamping desa masih diragukan, hal ini dikarenakan

kuantitas tenaga pendamping desa yang kurang dan kualitas kinerjanya yang belum optimal (Pratiwi dan Aida, 2017). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kepala desa masih belum paham dalam mengelola dana desa serta membuat pelaporan (Sandjojo, 2018).

Pada hubungan efektivitas kinerja pendamping lokal desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada hasil penelitian dari Parwati (2018) dan Romzah (2018) yang menyatakan bahwa kinerja pendamping desa berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Hal lain yang mempengaruhi proses pengoptimalan pengelolaan dana desa ialah keterlibatan masyarakat desa itu sendiri (Wibowo, 2018). Wibowo juga menyatakan jika penggunaan dana desa sejak tahun 2016 lebih terfokus bagaimana cara membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Segala prioritas kegiatan desa yang penggunaan dananya dari dana desa maupun hasil desa harus didapatkan persetujuan secara partisipatif dari hasil musyawarah desa. Sehingga hasil rapat tersebut dijadikan patokan dalam penentuan Rencana Kerja untuk Pemerintah Desa (RKPDesa) serta anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga menyatakan jika segala kegiatan yang berhubungan dengan desa terutama pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi asli desa. Untuk mencapai pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa serta agar dana yang diberikan tepat sasaran, maka masyarakat desa seharusnya benar-benar diajak untuk terlibat langsung secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga akan banyak pihak yang ikut mengontrol dan dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin

terjadi. Selain itu akan mempererat hubungan masyarakat dan pemerintah desa karena kontrol *check and balances* antara pemerintah dan masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa (Dwiputra, 2016). Maka dari itu, keterlibatan masyarakat sangat penting kehadirannya untuk menyampaikan pendapatnya sehingga dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya lebih tepat sasaran pada masyarakat luas. Berbagai tahapan dalam terlibatnya masyarakat tujuannya adalah untuk mewujudkan program pemerintah desa yang mandiri, yang didukung oleh masyarakatnya secara berdaya dan kreatif, sehingga niscaya apa yang menjadi harapan desa dan masyarakat dapat terealisasi dengan baik (Dao, 2018).

Pada hubungan keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa, peneliti mengacu pada hasil penelitian dari Julianto dan Dewi (2019), Fitrianda (2019), Anam dan Elfan (2019), Mada, dkk (2017) dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif serta signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃: Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini (1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. (2) Untuk mengetahui pengaruh efektivitas kinerja pendamping lokal desa terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. (3) Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan masyarakat terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa dan keterlibatan

masyarakat. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengoptimalan pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner yang disebarkan kepada responden. Skala dalam penyusunan kuesioner menggunakan skala *likert*.

Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor desa Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang hasilnya didapat dari responden melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 129 desa di Kabupaten Buleleng. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan yang telah ditentukan (Sugiyono, 2014). Hal yang diperhatikan dalam pemilihan sampel ini terfokus pada desa yang mengalami permasalahan tidak mematuhi aturan dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan juga belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) menggunakan dana desa tahap 1 dan II (Ardi, 2019). Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 29 sampel.

Adapun analisis data yang digunakan yaitu (1) analisis deskriptif, (2) uji kualitas data terdiri dari uji validitas serta uji reliabilitas instrumen, (3) Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi dan (4) uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (*Adjusted-R²*), uji regresi linier berganda dan uji parsial (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 232 kuesioner, dengan kuesioner yang kembali sebanyak 220 kuesioner sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 94,83 %. Merujuk pada hasil statistik deskriptif variabel kompetensi aparatur pemerintah desa mendapat nilai terendah (*mininum*) sebesar 21 dan nilai

tertinggi (*maximum*) sebesar 32 dan dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,78 yang berarti kompetensi aparatur pemerintah desa cenderung tinggi baik dari segi pendidikan, pengalaman kerja, *skill* dan kedisiplinan dalam bekerja dan standar deviasi 2,317. Variabel efektivitas kinerja pendamping lokal desa mendapat nilai terendah (*minimum*) sebesar 27 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 36 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 31,93 yang berarti efektifitas kinerja pendamping lokal desa cenderung baik dalam hal alur kerja yang konsisten dan mudah dipahami, pelatihan yang didapat, pengalaman yang dimiliki serta kemampuannya dalam melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah terkait dan standar deviasi 1,991. Variabel keterlibatan masyarakat mendapat nilai terendah

(*minimum*) sebesar 18 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 27 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,81 yang berarti keterlibatan masyarakat sudah sangat antusias dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan program desa dan standar deviasi 2,047. Sedangkan variabel pengoptimalan pengelolaan dana desa mendapat nilai terendah (*minimum*) sebesar 29 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 43 dan dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35,91 yang berarti pengoptimalan pengelolaan dana desa sudah baik dalam hal penyusunan anggaran desa, pembuatan RKP, Belanja kebutuhan desa dan dalam hal evaluasi dan pelaporan dana desa dan standar deviasi 2,512. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa (X1)	220	21	32	27,78	2,317
Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa (X2)	220	27	36	31,93	1,991
Keterlibatan Masyarakat (X3)	220	18	27	23,81	2,047
Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa (Y)	220	29	43	35,91	2,512

Sumber: data primer diolah, 2020

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui analisis responden terhadap setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian. Uji validitas bisa diketahui dengan melihat r_{hitung} (*Pearson Correlation*), Apabila *Pearson Correlation* > r_{tabel} (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan setiap item kuesioner valid (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai Sig. (*2-tailed*) < 0,05 sehingga ditarik kesimpulan jika seluruh item pertanyaan untuk setiap variabel dinyatakan valid.

Uji reliabilitas pengumpulan data dalam penelitian ini diukur berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha*. Jika suatu variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 maka variabel dikatakan reliabel (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Sehingga ditarik kesimpulan jika seluruh instrumen reliabel.

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test*. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		220
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	1,00530256
	<i>Absolute</i>	0,087
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	0,087
	<i>Negative</i>	-0,076
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,293
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,071

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebesar 0,071 dengan nilai signifikansi sebesar $0,071 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa residual data terdistribusi normal.

Uji multikolinearits, bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar

variabel independen pada model regresi. Pada uji ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF, dimana nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2009). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 3 berikut.

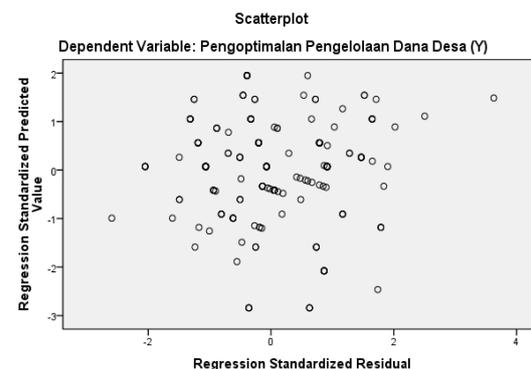
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa (X1)	0,192	5,198	Bebas Multikolinearitas
Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa (X2)	0,147	6,823	Bebas Multikolinearitas
Keterlibatan Masyarakat (X3)	0,235	4,255	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data diolah primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas diketahui bahwa semua variabel *independen* mempunyai nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga ditarik kesimpulan jika model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan *variance* dalam model regresi atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas disajikan pada *scatterplot* gambar 1 berikut.



Berdasarkan hasil gambar 1 dapat diperhatikan bahwa tidak ada pola tertentu yang terbentuk dari sebaran titik-titik pada *scatterplot*. Untuk mengetahui permasalahan terkait heteroskedastisitas

dapat dilihat dengan media grafik jika grafik tersebut menunjukkan adanya pola tertentu yang terbentuk maka dapat dikatakan suatu model terdapat heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016). Berdasarkan gambar 1 dapat ditarik kesimpulan jika data tidak memiliki masalah dalam heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

merubah waktu. Maka dari itu, jika asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai *disturbance* tidak lagi berpasangan melainkan berpasangan secara autokorelasi. Untuk mengetahui terdapat autokorelasi atau tidak dalam sebuah data maka dilakukan uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Hasil Uji Autokorelasi disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

D	dL	dU	4-DI	4-Du
1,777	1,5161	1,7516	2,4839	2,2484

Sumber: data primer diolah, 2020

Pada tabel 4 tersebut dapat dilihat jika nilai *Durbin Watson* (d) adalah 1,777 yang artinya nilai ini lebih dari dU = 1,7516 nilai ini juga kurang dari 4-dU = 2,484 sehingga $dU < d < 4-dU$ ($1,7516 < 1,777 < 2,2484$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika tidak terdapat autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Setelah semua uji asumsi klasik dilakukan, selanjutnya dilakukan dengan

uji hipotesis. Model regresi berganda bertujuan untuk membantu memecahkan rumusan masalah yang ada dimana fungsinya untuk melihat adanya pengaruh diantara dua variabel atau lebih.

Hasil analisis regresi berganda disajikan pada tabel 5 berikut

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,265	1,182	-	2,762	0,006
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	0,437	0,067	0,403	6,496	0,00
Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa	0,497	0,09	0,394	5,543	0,00
Keterlibatan Masyarakat	0,194	0,069	0,158	2,811	0,005

Sumber: data primer diolah, 2020

Regresi variabel dependen dan independen dari tabel 5 diatas menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,265 + 0,437X_1 + 0,479X_2 + 0,194X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta 3,265 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai konstan, maka rata-rata nilai variabel

dependen adalah sebesar 3,265. Koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah desa sebesar 0,437 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kompetensi aparatur pemerintah desa sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat

sebesar 0,437 satuan. Koefesien regresi efektivitas kinerja pendamping lokal desa sebesar 0,497 berarti bahwa apabila terdapat penambahan efektivitas kinerja pendamping lokal desa sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,497 satuan. Koefesien regresi keterlibatan masyarakat sebesar 0,194 berarti bahwa apabila terdapat penambahan keterlibatan masyarakat sebesar 1 satuan, maka pengoptimalan pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,194 satuan.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t. Uji hipotesis secara individual (uji t) digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh secara individual satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan menunjukkan $P < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2012). Hasil uji t disajikan pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,265	1,182	-	2,762	0,006
Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa	0,437	0,067	0,403	6,496	0,00
Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa	0,497	0,09	0,394	5,543	0,00
Keterlibatan Masyarakat	0,194	0,069	0,158	2,811	0,005

Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi aparatur pemerintah desa sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih dari t tabel ($6,496 > 2,257$) artinya bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Variabel efektivitas kinerja pendamping lokal desa menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih dari t tabel ($5,543 > 2,257$) artinya bahwa variabel X_2 mempunyai pengaruh terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan

yang searah dengan Y. Variabel keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai pengaruh terhadap Y. Dilihat dari nilai t didapatkan juga bahwa t hitung lebih dari t tabel ($2,811 > 2,257$) artinya bahwa variabel X_3 mempunyai pengaruh terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Setelah uji t, dilakukan uji koefesien determinasi R^2 untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila *Adjusted R²* semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel, ini berarti semakin tepat garis regresi untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2014). Hasil uji determinasi disajikan pada tabel 7 berikut

Tabel 7. Hasil Uji Koefesien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,916 ^a	0,84	0,838	1,012

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,838 yang menunjukkan bahwa variasi variabel kompetensi aparatur pemerintah desa, efektivitas kinerja pendamping lokal desa, dan keterlibatan masyarakat hanya mampu menjelaskan 83,8% variasi variabel pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sisanya sebesar 16,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,496 > 2,257$) sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Tarjo (2019), Handayani (2019), Gagali (2019), Kumalasari (2018), Mada,dkk (2017), Sugiarti dan Yudianto (2017) dan Mahayani (2017) yang menunjukkan bahwa semakin kompeten aparatur pengelola keuangan desa maka pengelolaan dana desa akan semakin optimal atau akuntabel.

Kompetensi seseorang dapat dilihat dari sejarah pendidikannya, kemampuan serta keterampilannya dalam menyelesaikan tugas maupun pelatihan yang diikuti. Perilaku yang baik seperti tidak melakukan korupsi atau penyelewengan dana serta bekerja

dengan hati nurani dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini mengelola uang pemerintah agar dapat digunakan secara optimal. Kompetensi yang baik dimiliki aparatur pemerintah desa secara tidak langsung akan menunjang pengoptimalan penggunaan dana desa (Mahayani, 2017).

Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya Kepala desa itu sendiri (Agustini, 2017). Seperti yang telah dijelaskan pada program Nawa Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggiran dimulai dari desa, maka diperlukan pengelolaan serta pemimpin yang kompeten dibidangnya. Pemerintah desa yang bertanggungjawab apalagi didukung dengan kualitas kinerja serta kompetensi yang dimiliki maka niscaya semua rencana desa selama satu tahun kedepan dapat terealisasi dengan baik. Kepala desa merupakan pemimpin desa yang memiliki peran penting sebagai pihak yang memberikan keputusan, *strategic positioner*, dan pihak yang memiliki pengaruh agar bisa sebagai tauladan bagi pihak-pihak terkait. Kepala desa harus memiliki satu *point* lebih dari rekannya yang lain seperti mampu *manage* waktu secara baik, memiliki pengetahuan serta *skill* dibidangnya, memiliki pengalaman, mengikuti segala pelatihan yang dilakukan pemerintah dan mampu mengkoordinasikan segala urusan secara baik dan adil kepada semua pihak yang ikut bekerja dengannya. (Agustini, 2017).

Pengaruh Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,543 > 2,257$), sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiguna (2017), Parwati (2018) dan Romzah (2018) yang menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja pendamping lokal desa dalam membantu, melayani, dan mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa maka dana desa yang digunakan akan semakin optimal dan tepat sasaran.

Keberadaan pendamping lokal desa menjadi salah satu syarat pendukung suksesnya pembangunan desa pengelolaan dana yang ada di desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa mengatakan jika tugas pendamping desa setara dengan kepala desa, hanya saja keputusan tertinggi tetap pada kepala desa itu sendiri. Pendamping lokal desa ditugaskan pemerintah untuk mampu membimbing, memfasilitas serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Banyak ditemukan jika permasalahan yang ada di desa dikarenakan kurangnya kehadiran dari pendamping serta kinerja pendamping yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu pemerintah selaku pihak yang memberikan kewenangan kepada pendamping memberikan berbagai macam pelatihan serta koordinasi secara intens agar kinerja pendamping bisa lebih ditingkatkan. (Pratiwi dan Aida, 2017).

Pada dasarnya pendamping lokal desa sangat diperlukan keberadaannya untuk desa agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki desa agar mampu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik itu dari sisi sosial budaya, politik maupun ekonomi.

Pengaruh Keterlibatan Masyarakat terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,811 > 2,257$), sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Julianto dan Dewi (2019), Fitrinanda (2019), Ardiyanti (2019), Anam dan Elfan (2019), Mada,dkk (2017) dan Putri (2017) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka semakin optimal dana desa tersebut dikelola. Hal ini dikarenakan karena semakin banyaknya masukan serta saran dari pihak masyarakat dalam memberikan pendapat tentang kendala yang terjadi di masyarakat serta turut memberikan pemikiran terkait prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

Keterlibatan masyarakat merupakan suatu kegiatan terlibatnya masyarakat dalam proses memecahkan masalah yang ada maupun mencari jalan keluar alternatif dari suatu permasalahan yang ada serta turut memberikan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pihak yang berwenang agar nantinya mampu merubah pola pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih baik lagi (Adi, 2007). Penggunaan dana desa akan optimal jika adanya keterlibatan dari masyarakat karena seperti yang telah kita ketahui jika masyarakat adalah pihak yang tahu betul bagaimana keadaan dilapangan dan secara langsung merasakan hasil dari kinerja aparat desa, sehingga sangat perlu adanya kehadiran masyarakat untuk memberikan aspirasi agar pengawasan dan program desa berjalan dengan baik karena diperhatikan oleh semua pihak.

Keterlibatan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan agar peran individu maupun kelompok masyarakat agar turut hadir dalam segala kegiatan desa untuk memberikan keluhan kesahnya, saran, waktu, tenaga, pemikiran dan lain

sebagainya yang dapat merubah desa menjadi lebih baik. (Sumaryadi, 2010). Keterlibatan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan secara aktif maupun proaktif dalam sebuah kegiatan (Solekhan, 2012). Dalam pembuatan keputusan, memag kehadiran masyarakat sangat diperlukan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspiranya, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terlibatnya masyarakat dibangun berdasarkan asas kebebasan untuk berasosiasi, berbicara dan turut berpartisipasi secara adil (Mardiasoma, 2000).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. (2) Efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. (3) Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini; (1) Bagi Pemerintah disarankan agar pelatihan mengenai sistem pengelolaan terkait dana desa, dimulai dari proses merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan serta evaluasi dilakukan pemantauan secara berkala, sehingga kendala atau masaah yang timbul bisa segera dicarikan jalan keluarnya. (2) Bagi desa disarankan untuk lebih melakukan komunikasi yang baik terhadap pihak terkait yang turut serta

berperan dalam mengelola dana desa, sehingga apa yang menjadi tujuan utama bisa terealisasi dan tidak melenceng dari tujuan sebenarnya. Pihak terkait dalam hal ini seperti pemerintah, pendamping lokal desa maupun masyarakat desa baik yang terhimpun dalam suatu lembaga tertentu maupun tidak. (3) Bagi penelitian berikutnya diharapkan untuk memperluas wilayah jangkauan sampel sehingga hasil dan kesimpulan penelitian ini dapat diterapkan untuk pemerintah desa yang lain. Selain itu penelitian berikutnya diharapkan untuk bisa menambah variabel independen yang kiranya bisa mempengaruhi pengoptimalan pengelolaan dana desa seperti sistem pengendalian internal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Firly Nur. 2017. "Pentingnya Kompetensi Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa".
- Ardi. 2019. "29 Desa di Kabupaten Buleleng terancam tak cairkan dana desa tahap III tahun 2019". BaliPuspaNews.com (diakses tanggal 28 Februari 2020).
- Anam, Mashurin, dan Elfan Kaukab. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)" Jurnal, Vol.1.
- Danisari, Mia Chitra. 2018. "Ini Penyebab Serapan Dana Desa Masih Rendah". Tersedia pada <https://finansial.bisnis.com/read/20180426/9/788837/ini-penyebab-serapan-dana-desa-masih-rendah>. (diakses pada 11 April 2020).
- Dao, Yunias. 2018. "Membangun Desa Mandiri". Tersedia pada <https://news.detik.com/kolom/d-4034695/membangun-desa-mandiri>. (diunduh pada 15 April 2020).

- Dwiputra, Bagas Januarinaldi. 2016. "Agar Pemanfaatan Dana Desa Tepat Sasaran" Tersedia pada <https://www.kompasiana.com/bagasjanuarinaldid/5692dd612b7a61a60dcc71ec/agar-pemanfaatan-dana-desa-tepat-sasaran>. (diunduh pada 15 April 2020).
- Fitrinanda, Dara. 2019. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". Jurnal Universitas Syiah Kuala.
- Gagali, Yakub Rozani. 2019. "Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Kompetensi dan Peran Internal Audit Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Utara. vol.3 No 2 Jurnal.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang:Badan Penerbit UNDIP. Hadiyati, Ernani.2010.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Vol.100-125. Irawan. 2007.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang:Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Handayani. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa". Skripsi Institut Islam Negeri Surakarta.
- Hartono, Madong. 2019. "29 Desa di Kabupaten Buleleng terancam tak cairkan dana desa tahap III tahun 2019". BaliPuspaNews.com (diakses tanggal 28 Februari 2020).
- Julianto, I Putu dan Rencana Sari Dewi. 2019. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Kumalasari Lisa. 2018. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Peran Kepala Desa Sebagai Variabel Pemoderasi Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bayat". Skripsi. Universitas Widya Dharma.
- Latan, H., dan Temalagi, S. (2013). *Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20*. Bandung: Alfabeta.
- Mada Sarifudin, dkk. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo". Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi.
- Mahayani, N.L.A. (2017). *Prosocial behavior dan persepsi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No.2*.
- Mardiasmo. 2009. "Akuntansi Sektor Publik, Edisi IV" Penerbit: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015. "Tentang Pendamping Lokal Desa".
- Pratiwi, Resti dan Ade Nurul Aida. "Pentingnya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa".
- Putri, Safrida. 2017. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)". Jurnal Universtas Kuala.
- Romdoni, M.Sukamara. 2019. "Kinerja Pendamping Desa Dinilai Belum Maksimal". Tersedia pada <https://www.borneonews.co.id/berita/1>

- [15068-kinerja-pendamping-desa-dinilai-belum-maksimal](#). (diunduh pada 11 April 2020).
- Romzah Siti. 2018. "Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sandjojo, Eko Putro. 2018. "Kemendes Pecat Lebih dari 1.000 Pendamping Desa tidak Baik. Tersedia pada <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/desabangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebih-dari-1000-pendamping-desa-tidak-baik>. (diunduh pada 11 April 2020).
- Solekhan, Moch. 2012. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Setara, Malang. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983,"Pengantar Hukum Tata Negara.
- Sugiarti, Ekasari dan Ivan Yudianto. 2017. "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas (Survei pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Jurnal Universitas Padjajaran.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. "Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat". Jakarta: Penerbit Citra Utama. Sunarti. 2003.
- Tarjo. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Pengaruh Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo" Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2014. Jakarta.
- Wibowo, Dwi Mukti. 2019. "Pemprakarsa Gerakan Save Our Sea" Tersedia pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. (diakses pada 11 April 2020).
- Wiguna Dharma. 2017. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi pada desa penerima dana desa di Kabupaten Buleleng". Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha